

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan wilayah daratan yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang memiliki fungsi menangkap, menyimpan dan mengalirkan air hujan ke laut melalui sungai utama (Asdak,2007). Pada umumnya DAS terbagi menjadi tiga bagian yakni daerah hulu, tengah dan hilir. Daerah hulu merupakan daerah tertinggi yang biasanya berfungsi sebagai daerah konservasi. Daerah hilir merupakan daerah yang memiliki kelerengan lereng kecil hingga sangat kecil dan secara umum berfungsi sebagai daerah pemanfaatan (seperti waduk dan pembangkit listrik tenaga air) sedangkan daerah tengah merupakan daerah transisi kedua karakteristik daerah hulu dan daerah hilir. Keterkaitan antara hulu-hilir daerah aliran sungai sangat erat. Kerusakan alam atau degradasi lahan pada daerah hulu akan berakibat buruk pada daerah hilirnya, misalnya penurunan kinerja waduk.

Kota Batu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030 memiliki misi mewujudkan ruang Kota Batu yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai wilayah penopang hulu Sungai Brantas. Berdasarkan kajian yang dilakukan pada DAS Hulu Brantas yang masuk kedalam wilayah administrasi Kota Batu, terjadi aktivitas penggunaan lahan yang tidak mengindahkan kaidah konservasi sehingga lahan terdegradasi dan menyebabkan longsor (Dermawan,2009).

Aspek ekonomi, sosial budaya dan kebijakan juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi lahan. Aspek ekonomi yakni tekanan ekonomi masyarakat, sedangkan aspek sosial budaya seperti pengetahuan dan penerapan teknologi (Irwan dan Suparmoko, 1998 dalam Rianse 2010), serta permasalahan kelembagaan dan hukum juga mempengaruhi pengelolaan sumber daya (Sugandhy,1999 dalam Rianse 2010). Teori tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Subarna (2011), dimana faktor yang melatarbelakangi terjadinya perambahan hutan adalah tekanan ekonomi masyarakat dan kegiatan pengawasan pada kawasan hutan. Tekanan ekonomi memberikan motivasi bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan keluarga melalui penggarapan lahan di hutan lindung, sedangkan keberadaan kegiatan pengawasan pada kawasan hutan mempengaruhi kegiatan pencurian kayu. Penelitian yang dilakukan oleh Pasha (2009) juga memperkuat teori tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor ekonomi dan pendidikan

menjadi faktor yang mempengaruhi perambahan hutan, dimana semakin rendah tingkat pendidikan perambah maka kecenderungan terhadap terjadinya perambahan semakin tinggi.

Berdasarkan dokumen Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas Tahun 2010, pada Kota Batu terdapat 952,05ha lahan kritis. Lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan (Peraturan Menteri Kehutanan No 32 Tahun 2009). Lahan kritis dengan luasan terbesar berdasarkan batas administrasi desa di Kota Batu terdapat pada Desa Tulungrejo dengan status agak kritis. Desa Tulungrejo merupakan desa dengan luas wilayah 4155,42 hektar. Berdasarkan hasil overlay antara deliniasi lahan kritis oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas dengan peta guna lahan, lokasi lahan kritis menempati kawasan hutan (373,50ha) dan kawasan budidaya (5,73ha) dengan luas total 379,23Ha.

Keberadaan lahan kritis menjadi sangat penting untuk diatasi. Keberadaan lahan kritis, yang dapat ditandai dengan adanya kegiatan erosi, akan menggerus dan membawa partikel-partikel tanah melewati jaringan sungai. Pada akhirnya partikel tanah tersebut masuk ke dalam waduk yang terletak pada bagian hilir das dan menjadi sedimen serta mengurangi daya tampung waduk. Selain itu, kegiatan erosi yang membawa partikel tanah, secara bersamaan akan membawa unsur hara tanah sehingga dapat mengurangi kesuburan tanah. Lahan kritis juga dapat menyebabkan menurunnya daya resap tanah terhadap air, sehingga dapat mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau (Hardiyatmo,2006).

Untuk mengatasi lahan kritis, perlu dilakukan perencanaan pengelolaan sumber daya alam secara tepat. Dalam hal melakukan perencanaan dibutuhkan partisipasi masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengamanatkan perlunya partisipasi masyarakat baik pada saat penyusunan rencana, pemanfaatan maupun pada saat pengendalian. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konservasi Lahan Kritis Berbasis Partisipatif di Desa Tulungrejo”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, dapat diketahui permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan lahan pada DAS Hulu Brantas pada administrasi Kota Batu yang tidak mengindahkan kaidah konservasi (Dermawan, 2009).
2. Terdapat lahan kritis pada Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Das Brantas pada Tahun 2010 seluas 342,86 Ha dan 36,37 Ha.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kecamatan Bumiaji dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, perencanaan konservasi lahan masih bersifat *top down*. Metode perencanaan *top down* seringkali menghasilkan suatu program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga program tidak dapat berjalan dengan baik (Adimihardja,2003).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik fisik, sosial, ekonomi, dan kebijakan yang terkait lahan kritis Desa Tulungrejo?
2. Bagaimana arahan konservasi pada lahan kritis berbasis partisipatif di Desa Tulungrejo?

1.4. Tujuan

Berdasarkan rumusan mengenai permasalahan yang akan di bahas, tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik fisik, sosial, ekonomi, dan kebijakan yang terkait lahan kritis di Desa Tulungrejo.
2. Menentukan arahan konservasi pada lahan kritis berbasis partisipatif di Desa Tulungrejo.

1.5. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat bagi Akademisi

Manfaat penelitian bagi akademisi adalah memberikan gambaran mengenai proses perumusan arahan dalam hal konservasi lahan dengan pendekatan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan konservasi lahan dan penerapan perencanaan partisipatif bagi pengambilan keputusan.

3. Manfaat Bagi Masyarakat Desa

Manfaat penelitian bagi masyarakat setempat adalah sebagai bahan pembelajaran perumusan arahan konservasi pada lahan kritis dan penyelesaian masalah secara mandiri.

1.6. Ruang Lingkup

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Secara garis besar, ruang lingkup wilayah studi adalah lahan kritis hasil kajian dari Balai Penelitian Daerah Aliran Sungai Brantas tahun 2010 yang terletak di Desa Tulungrejo. Secara administratif, Desa Tulungrejo dibatasi oleh batas administratif sebagai berikut:

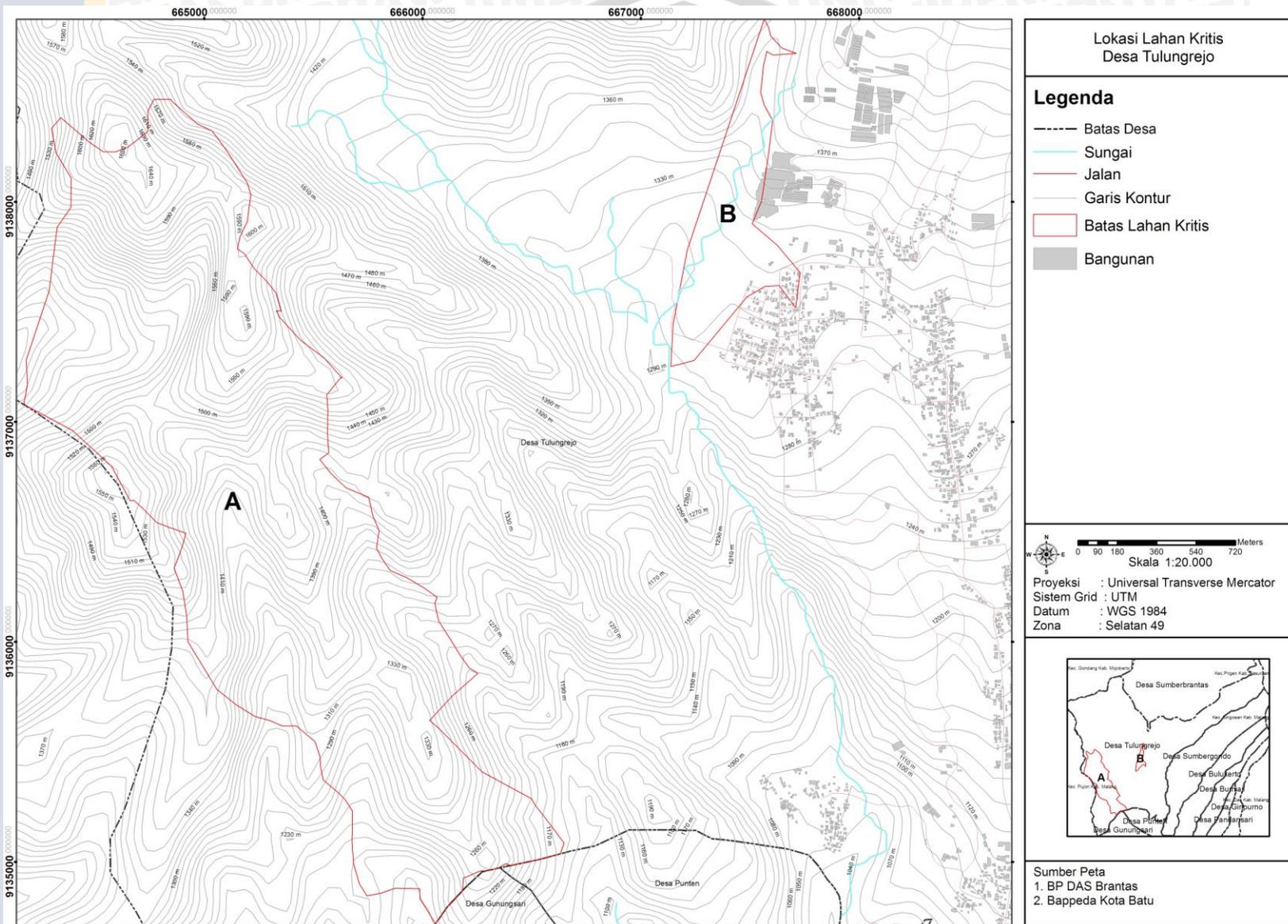
Batas Utara : Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji

Batas Selatan : Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji

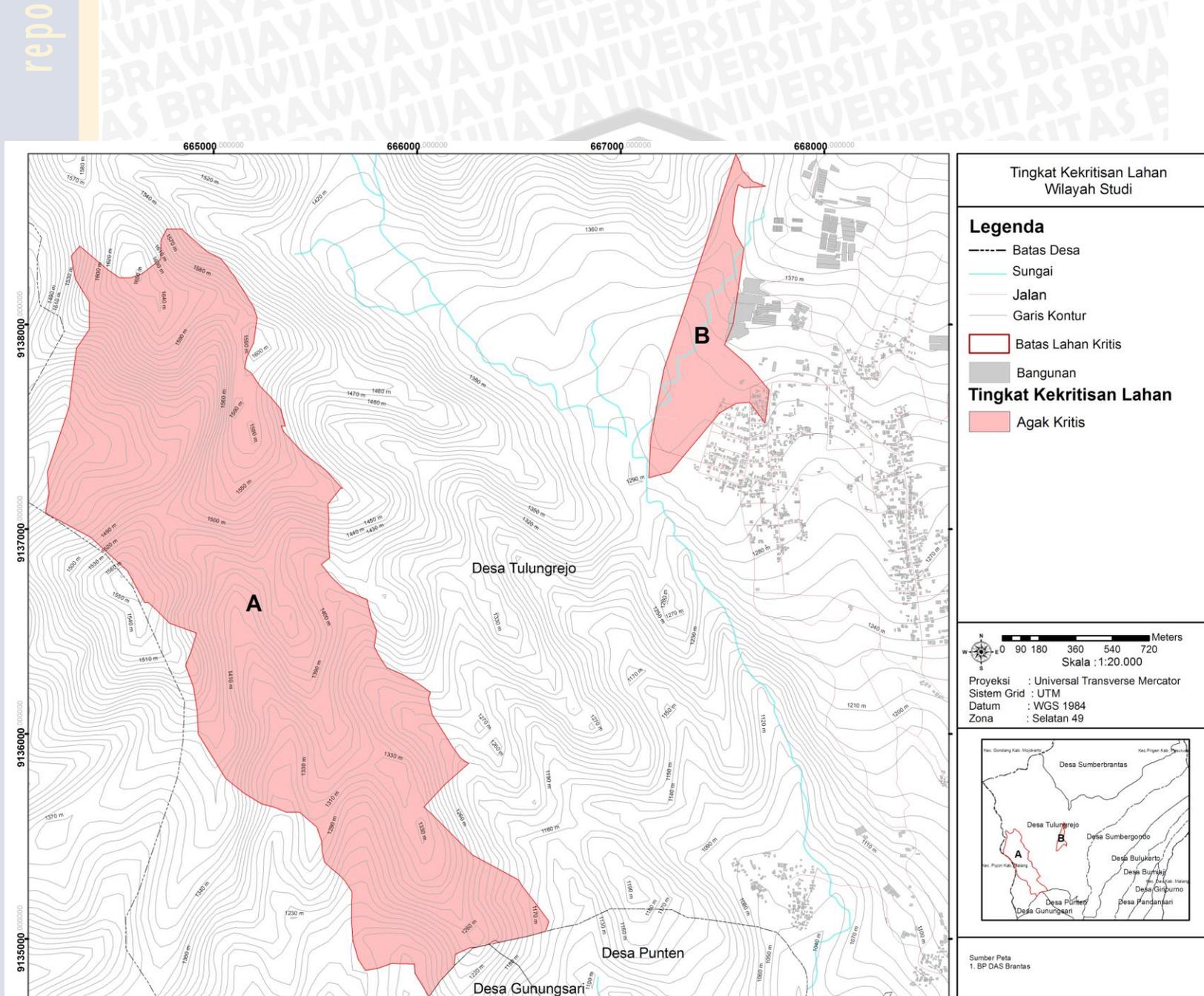
Batas Timur : Desa Punten, Kecamatan Bumiaji

Batas Barat : Pujon, Kabupaten Malang





Gambar 1.1 Peta Lokasi Lahan Kritis Desa Tulungrejo

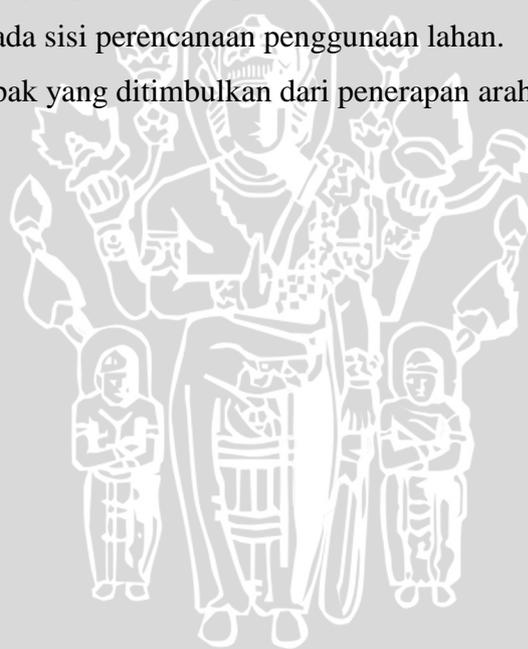


Gambar 1.2 Peta Tingkat Kekritisian Lahan Wilayah Studi

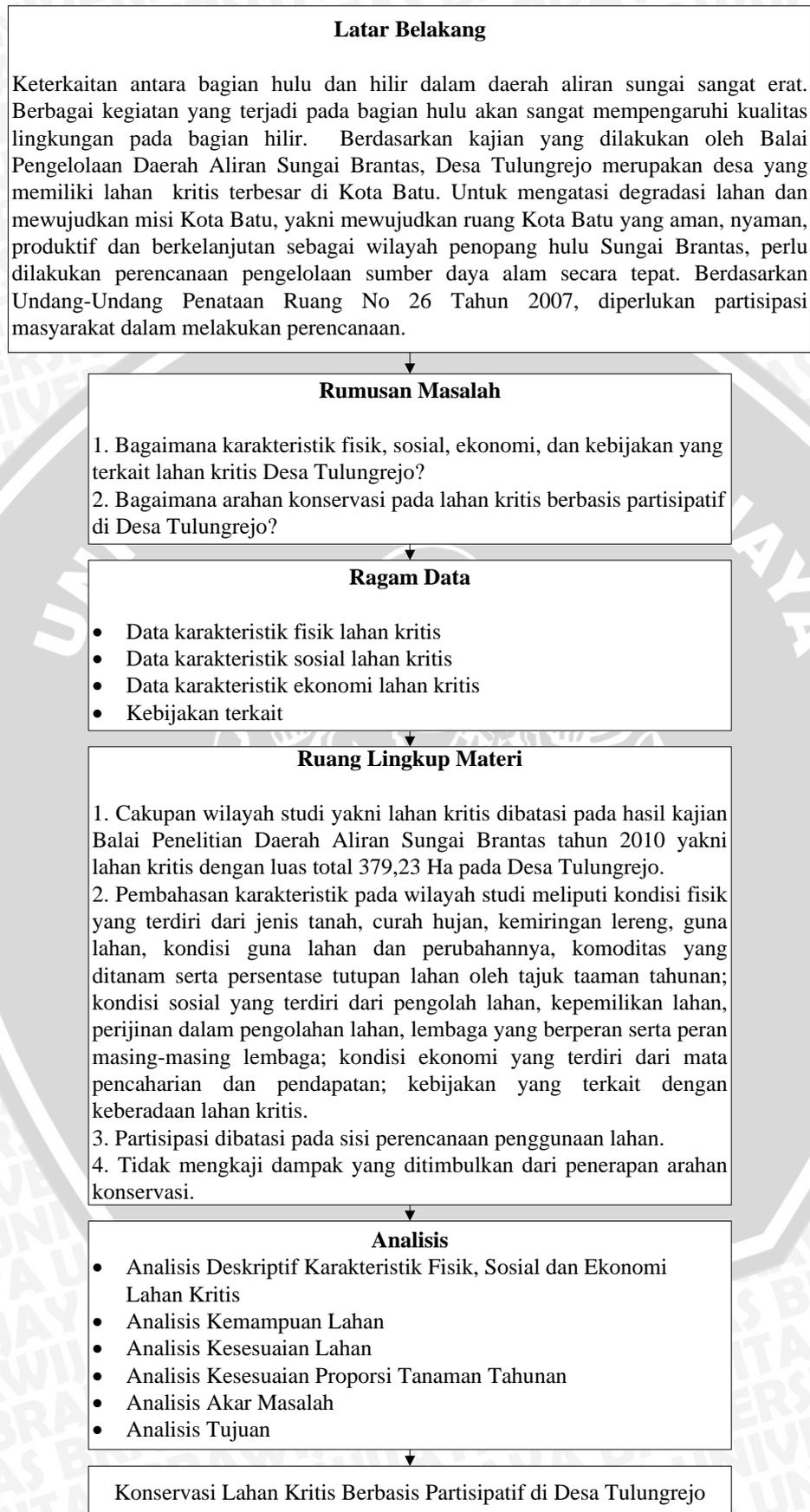
1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Materi yang dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Cakupan wilayah studi yakni lahan kritis dibatasi pada hasil kajian Balai Penelitian Daerah Aliran Sungai Brantas tahun 2010 yakni lahan kritis dengan luas total 379,23 Ha pada Desa Tulungrejo.
2. Pembahasan karakteristik pada wilayah studi meliputi kondisi fisik yang terdiri dari jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, guna lahan, kondisi guna lahan dan perubahannya, komoditas yang ditanam serta persentase tutupan lahan oleh tajuk tanaman tahunan; kondisi sosial yang terdiri dari pengolahan lahan, kepemilikan lahan, perijinan dalam pengolahan lahan, lembaga yang berperan serta peran masing-masing lembaga; kondisi ekonomi yang terdiri dari mata pencaharian dan pendapatan; kebijakan yang terkait dengan keberadaan lahan kritis.
3. Partisipasi dibatasi pada sisi perencanaan penggunaan lahan.
4. Tidak mengkaji dampak yang ditimbulkan dari penerapan arahan konservasi.



1.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran

1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan urutan dan isi dari setiap bab penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah serta kerangka pemikiran dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan analisis data serta berisi diagram alir penelitian dan desain survei.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai gambaran dari wilayah studi serta proses analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi simpulan terhadap hasil pembahasan serta saran sebagai rekomendasi kepada berbagai pihak yang terkait dengan tema penelitian.

